

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan paparan data, temuan penelitian dan pembahasan, maka kesimpulan dari penelitian ini sebagai berikut.

1. Keterlibatan kiai dalam politik di pesantren Jombang disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk nilai-nilai Islam, kepentingan pesantren, serta dinamika sosial-politik yang terus berkembang. Meskipun kiai memiliki peran penting sebagai pemimpin spiritual, mereka juga berfungsi sebagai pendidik politik dan mediator antara umat Islam dan pemerintah. Namun, tantangan utama yang dihadapi adalah menjaga independensi pesantren dari pengaruh politik praktis agar tidak menggeser fungsi utamanya sebagai pusat pendidikan dan dakwah. Oleh karena itu, kiai tetap berpegang pada prinsip keislaman untuk menghindari pragmatisme politik yang dapat mengurangi legitimasi moral mereka. Dalam konteks demokrasi Indonesia, peran kiai diharapkan tetap berorientasi pada nilai-nilai etika, kebangsaan, dan kepentingan umat secara luas. Dengan demikian, pesantren tidak hanya berkontribusi dalam pendidikan Islam, tetapi juga dalam dinamika politik dengan tetap menjaga keseimbangan antara nilai-nilai keagamaan dan partisipasi politik agar tidak kehilangan integritas serta relevansi sosialnya.
2. Pilihan politik kiai di pesantren Jombang dipengaruhi oleh faktor keagamaan, sosial, ekonomi, dan hubungan historis dengan organisasi keislaman. Terdapat dua pola utama, yaitu kiai yang aktif mendukung partai tertentu dan kiai yang memilih netralitas sebagai pendidik politik. Pilihan politik kiai bersifat fleksibel, menyesuaikan dengan kebijakan partai, kepemimpinan nasional, dan dinamika politik lokal. Selain sebagai pemimpin spiritual, kiai juga berperan sebagai penjaga moral politik dan mediator antara umat dan pemerintah. Dalam konteks demokrasi, keterlibatan kiai berlandaskan nilai Islam, menjaga keseimbangan antara peran keulamaan dan politik, serta berorientasi pada kemaslahatan umat. Independensi pesantren

dari intervensi politik praktis tetap dipertahankan agar fungsinya sebagai pusat pendidikan dan pembinaan moral tidak terganggu.

## **B. Implikasi Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk memahami tindakan kiai dalam menentukan pilihan partai politik di Jombang, dengan fokus pada pengaruh budaya politik, tradisi pesantren, dan dinamika sosial yang melingkupinya. Dalam konteks politik lokal Indonesia, terutama di wilayah dengan basis pesantren yang kuat, kiai memainkan peran sentral sebagai pemimpin spiritual sekaligus penggerak sosial. Penelitian ini tidak hanya memberikan wawasan tentang pola preferensi politik kiai, tetapi juga menyoroti pengaruh budaya politik parokial, kaula, dan partisipasi terhadap pilihan politik yang diambil.

Implikasi dari penelitian ini penting untuk berbagai pemangku kepentingan. Bagi akademisi, penelitian ini memperkaya literatur sosiologi politik dengan menyoroti hubungan erat antara agama, budaya, dan politik lokal. Bagi pembuat kebijakan, hasil penelitian ini dapat menjadi panduan dalam merumuskan kebijakan yang menghargai kearifan lokal sekaligus mendorong partisipasi politik yang inklusif. Selain itu, bagi komunitas pesantren, penelitian ini menawarkan refleksi kritis untuk memahami peran kiai dalam menjaga harmoni sosial dan keberlanjutan nilai-nilai keagamaan dalam ranah politik. Dengan demikian, penelitian ini membuka ruang diskusi bagi pendekatan politik yang lebih etis dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat luas.

### **1. Implikasi Teoritis**

#### **a. Tindakan Kiai Dalam Pilihan Partai Politik Di Pesantren Jombang**

Implikasi teoritik dari pilihan politik kiai di pesantren Jombang dapat dianalisis melalui teori-teori yang relevan, seperti Marx, Almond, dan Bourdieu. Dalam perspektif Marxian, pilihan politik kiai dapat dipahami sebagai bagian dari perjuangan kelas dan upaya mempertahankan posisi mereka dalam struktur sosial yang berbasis ekonomi. Kiai menggunakan modal ekonomi dan jaringan politik untuk memperkuat posisi komunitas pesantren dalam dinamika sosial dan politik lokal, sehingga mereka dapat melindungi kepentingan kolektif kelas pesantren.

Gabriel Almond menawarkan klasifikasi budaya politik yang relevan dalam menjelaskan perilaku politik kiai. Dalam konteks ini, budaya politik parokial terlihat pada kiai yang lebih fokus pada pendidikan dan dakwah tanpa melibatkan diri secara aktif dalam politik praktis. Budaya politik kaula tercermin dari kiai yang patuh pada arahan politik dari ulama senior atau organisasi keagamaan yang lebih besar. Sementara itu, budaya politik partisipan ditunjukkan oleh kiai yang aktif berperan sebagai pengarah opini atau bahkan terlibat sebagai kandidat dalam kontestasi politik.

Pierre Bourdieu memperkenalkan konsep modal sosial dan budaya yang dapat digunakan untuk memahami pengaruh kiai dalam politik. Kiai memiliki modal sosial berupa jaringan yang luas dengan politisi dan pemangku kebijakan, yang memberikan keuntungan dalam memperjuangkan kepentingan pesantren. Selain itu, modal budaya berupa otoritas simbolik yang tinggi memungkinkan kiai mengarahkan pilihan politik santri dan masyarakat sekitar. Modal-modal ini menjadi alat penting dalam mempertahankan posisi strategis mereka dalam struktur sosial dan politik lokal.

Implikasi teoritik dari perspektif ini menunjukkan bahwa tindakan politik kiai mencerminkan upaya menjaga dominasi pesantren sebagai institusi yang tidak hanya berperan dalam pendidikan agama tetapi juga dalam membentuk arah politik lokal. Di sisi lain, keterlibatan politik kiai juga berpotensi menghadirkan dilema, terutama dalam menjaga independensi pesantren dari kepentingan politik praktis. Dengan memahami dinamika ini, kebijakan yang mendukung demokratisasi dapat dirancang untuk memperkuat peran pesantren tanpa mengorbankan nilai-nilai moral dan keagamaan yang menjadi dasar eksistensinya.

## **b. Keragaman Dan Dinamika Tindakan Kiai Dalam Pilihan Partai Politik Di Pesantren Jombang**

Implikasi teoritik dari keragaman dan dinamika tindakan kiai dalam pilihan partai politik di pesantren Jombang dapat dianalisis melalui perspektif budaya politik Gabriel Almond serta konsep modal dan arena politik dari Pierre Bourdieu. Dalam perspektif Almond, budaya politik kiai di pesantren merupakan perpaduan antara budaya politik subjek dan partisipan. Budaya politik subjek terlihat dari ketaatan masyarakat pesantren terhadap otoritas kiai, di mana keputusan politik kiai sering kali diikuti tanpa banyak pertanyaan. Sementara itu, budaya politik partisipan tampak dalam keterlibatan aktif kiai dan komunitas pesantren dalam kontestasi politik, yang didasarkan pada pertimbangan keagamaan dan kepentingan pesantren.

Dalam konteks modal dan arena politik yang dikembangkan oleh Bourdieu, tindakan politik kiai tidak hanya dipengaruhi oleh faktor keagamaan, tetapi juga oleh modal sosial, budaya, ekonomi, dan simbolik yang mereka miliki. Modal sosial kiai bersumber dari jaringan luas dengan santri, alumni, serta tokoh-tokoh agama dan politik. Modal budaya mereka mencakup legitimasi keulamaan dan otoritas moral yang memungkinkan mereka memberikan arah politik kepada komunitasnya. Modal ekonomi berkaitan dengan sumber daya finansial pesantren, yang sering kali mempengaruhi pilihan politik kiai, terutama dalam mendukung partai atau kandidat yang dapat memberikan dukungan bagi kesejahteraan pesantren. Modal simbolik kiai terlihat dari status sosial mereka sebagai pemimpin spiritual yang dihormati dan ditaati oleh masyarakat, memungkinkan mereka menjadi mediator antara partai politik dan umat Islam.

Selain faktor identitas keagamaan, aspek ekonomi dan jaringan sosial juga memainkan peran penting dalam keputusan politik kiai. Menurut penelitian, jaringan pesantren sering kali membentuk oligarki kekuasaan yang berperan dalam menentukan arah dukungan politik. Kiai yang memiliki modal sosial yang kuat cenderung mendapatkan posisi strategis dalam arena politik, sesuai dengan konsep modal sosial dan simbolik Bourdieu. Hal ini

menunjukkan bahwa keterlibatan kiai dalam politik tidak hanya bersifat pragmatis, tetapi juga memiliki dimensi moral dan sosial yang kuat.

Lebih lanjut, penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan kiai dalam pemilihan kepala daerah tidak hanya terbatas pada dukungan terhadap kandidat tertentu, tetapi juga mencakup peran sebagai mediator dalam konflik politik lokal. Dalam banyak kasus, kiai berperan sebagai penengah antara masyarakat dan elite politik, serta membantu membangun stabilitas sosial melalui komunikasi yang efektif antara pemerintah dan masyarakat. Hal ini mencerminkan bahwa keterlibatan kiai dalam politik tidak hanya ditujukan untuk memperoleh keuntungan politik, tetapi juga untuk memastikan keseimbangan dan harmoni sosial dalam komunitasnya.

Fleksibilitas dalam pilihan politik kiai juga dapat dijelaskan dengan konsep habitus dalam teori Bourdieu. Habitus merupakan struktur mental atau disposisi yang terbentuk oleh pengalaman sosial seseorang dan menentukan cara mereka berpikir serta bertindak dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konteks politik, habitus kiai dipengaruhi oleh pengalaman mereka dalam menghadapi dinamika politik di Indonesia, termasuk hubungan pesantren dengan organisasi keislaman seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah, serta interaksi mereka dengan partai politik. Hal ini membuat keputusan politik kiai tidak bersifat kaku, tetapi responsif terhadap perubahan politik nasional dan lokal.

Namun, peran kiai dalam politik juga menimbulkan tantangan, terutama dalam menjaga keseimbangan antara peran keulamaan dan politik. Sebagai pemimpin spiritual, kiai berhati-hati dalam menggunakan modal simbolik mereka dalam arena politik, memastikan bahwa tindakan mereka tetap berorientasi pada kemaslahatan umat dan tidak merusak reputasi serta legitimasi yang telah mereka bangun. Dalam beberapa kasus, keterlibatan kiai dalam politik dapat menimbulkan persepsi negatif atau bahkan konflik kepentingan, terutama jika dukungan politik yang diberikan tidak sejalan dengan harapan masyarakat atau menimbulkan perpecahan di antara umat.

Dengan demikian, keterlibatan kiai dalam politik pesantren Jombang merupakan fenomena yang kompleks, di mana faktor agama, budaya politik, modal sosial, dan hubungan historis dengan organisasi keislaman memainkan peran kunci dalam menentukan sikap politik mereka. Dengan menggunakan pendekatan budaya politik Almond dan teori modal serta arena Bourdieu, dapat dipahami bahwa tindakan politik kiai bukan hanya sekadar ekspresi preferensi pribadi, tetapi juga merupakan bagian dari strategi yang lebih luas untuk mempertahankan posisi mereka dalam masyarakat dan memastikan keberlanjutan pesantren dalam lanskap politik yang terus berkembang.

### **c. Fleksibilitas Politik Kiai Sebuah Pendekatan Baru dalam Studi Islam dan Demokrasi**

Dalam dinamika politik Indonesia, peran kiai tidak dapat dilepaskan dari sejarah panjang interaksi antara agama dan kekuasaan. Kiai, sebagai pemimpin spiritual sekaligus figur sosial, memiliki keterlibatan yang kompleks dalam politik. Penelitian ini mengungkap bahwa keterlibatan politik kiai bukan semata-mata bersifat pragmatis atau ideologis, tetapi lebih sebagai model dinamis yang terus berkembang seiring perubahan sosial, ekonomi, dan politik di Indonesia. Salah satu temuan utama dalam penelitian ini adalah fleksibilitas politik dan moral kiai. Fleksibilitas ini mencerminkan bagaimana kiai tidak hanya bertindak berdasarkan kepentingan jangka pendek, tetapi juga mempertimbangkan faktor keagamaan, sosial, dan ekonomi, serta hubungan historis dengan organisasi keislaman. Dengan demikian, pilihan politik kiai tidak dapat dilihat secara hitam-putih, melainkan sebagai respons terhadap dinamika yang lebih luas.

Temuan ini juga menegaskan adanya dualisme peran yang dimainkan oleh kiai. Di satu sisi, mereka berperan sebagai pemimpin spiritual yang menjaga nilai-nilai keislaman dalam kehidupan umat. Di sisi lain, mereka juga berfungsi sebagai aktor politik yang mempertimbangkan stabilitas pesantren dan kepentingan umat yang lebih luas. Kombinasi dua peran ini membuat keputusan politik kiai menjadi semakin kompleks dan penuh pertimbangan strategis. Dalam penelitian ini, keterlibatan politik kiai

dikategorikan dalam tiga model utama. *Pertama*, Kiai Partisan, yakni kiai yang secara aktif mendukung partai politik atau kelompok tertentu. *Kedua*, Kiai Netral, yaitu kiai yang memilih untuk tidak terlibat dalam politik praktis secara langsung. *Ketiga*, Kiai Mediator, yakni kiai yang berperan sebagai jembatan antara berbagai kepentingan politik dan umat. Keberagaman model ini menunjukkan bahwa kiai tidak memiliki satu pola politik yang baku, melainkan beradaptasi sesuai dengan kebutuhan zaman dan kondisi yang dihadapi.

Meskipun kiai memiliki peran politik yang signifikan, mereka juga menghadapi tantangan besar dalam menjaga nilai-nilai Islam dan independensi pesantren. Dalam kondisi politik yang terus berubah, kiai tetap mempertahankan legitimasi moral agar tidak kehilangan kepercayaan dari umat. Hal ini menjadi tantangan utama dalam memastikan bahwa politik Islam tetap memiliki esensi etis dan tidak terjebak dalam kepentingan pragmatis semata. Temuan ini memberikan implikasi teoritis yang signifikan terhadap studi politik Islam dan demokrasi di Indonesia. Peran dinamis kiai dalam politik mencerminkan bagaimana Islam dan demokrasi dapat berinteraksi dalam bentuk yang fleksibel dan adaptif. Selain itu, penelitian ini juga menawarkan wawasan tentang strategi politik pesantren dalam menghadapi tantangan zaman tanpa mengorbankan nilai-nilai dasar keislaman.

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa tindakan politik kiai bersifat dinamis dan adaptif terhadap perubahan sosial-politik. Dengan tetap menjaga independensi pesantren, kiai mampu mempertahankan legitimasi moralnya di tengah kompleksitas politik modern. Dengan demikian, fleksibilitas politik kiai tidak hanya menjadi refleksi dari strategi bertahan dalam lingkungan politik yang fluktuatif, tetapi juga sebagai upaya untuk menjaga keseimbangan antara agama dan politik di Indonesia.

### Rekomendasi Implikasi Teoritik

No	Penjelasan Implikasi Teori	Deskripsi
1	Fleksibilitas Politik dan Moral Kiai	Menjelaskan bahwa tindakan politik kiai tidak hanya bersifat pragmatis atau ideologis, tetapi merupakan model dinamis keterlibatan kiai dalam politik.
2	Keterangan	Penelitian menemukan bahwa pilihan politik kiai dipengaruhi oleh faktor keagamaan, sosial, ekonomi, hubungan dengan sejarah organisasi keislaman serta keluarga.
3	Konsep Utama Teori	Menjelaskan konsep utama yang membentuk teori ini.
4	Dualisme Peran Kiai	Kiai memiliki dua peran, yaitu sebagai pemimpin spiritual sekaligus sebagai aktor politik yang mempertimbangkan stabilitas pesantren serta kepentingan umat.
5	Fleksibilitas Politik Kiai	Pilihan politik kiai bersifat dinamis dan responsif terhadap perubahan kebijakan, kepemimpinan nasional, serta konfigurasi politik lokal.
6	Model Keterlibatan Politik Kiai	Kiai dalam politik dikelompokkan dalam tiga model yaitu Kiai Partisan, Kiai Netral, dan Kiai Mediator.
7	Kemerdekaan dan Tantangan Keulamaan	Kiai harus menjaga nilai-nilai Islam dan independensi pesantren agar tidak kehilangan legitimasi moral.
8	Implikasi Teori	Mempelajari bagaimana teori ini berimplikasi pada peran kiai, model politik Islam dalam demokrasi Indonesia, dan strategi politik pesantren.
9	Kesimpulan	Tindakan politik kiai bersifat dinamis dan adaptif terhadap kondisi sosial-politik, dengan tetap menjaga independensi pesantren agar tidak kehilangan legitimasi.

## 2. Implikasi Praktis

### a. Tindakan Kiai dalam Pilihan Partai Politik Di Pesantren Jombang

Pilihan politik kiai memiliki dampak signifikan terhadap stabilitas sosial dan politik di Jombang. Sebagai pemimpin spiritual dan sosial, kiai mampu menjaga keseimbangan antara ajaran agama dan keterlibatan politik. Namun, jika afiliasi politik terlalu dominan, pesantren bisa mengalami fragmentasi internal akibat perbedaan pandangan politik. Oleh karena itu, kiai

perlu menjaga independensi dalam berpolitik agar tidak menimbulkan polarisasi di kalangan santri dan masyarakat.

Kiai juga memiliki peran penting dalam membentuk preferensi politik santri dan masyarakat melalui pendekatan sosialisasi politik. Berdasarkan theory Gabriel Almond, kiai berfungsi sebagai agen sosialisasi yang dapat membentuk budaya politik partisipan, kaula, atau parokial. Implikasi praktisnya adalah bahwa santri dan masyarakat pesantren cenderung memilih kandidat atau partai yang direkomendasikan oleh kiai, sehingga meningkatkan efektivitas strategi politik berbasis jaringan kultural dan agama.

Selain itu, dengan posisi strategis yang dimiliki kiai, mereka dapat mempengaruhi kebijakan publik, terutama yang berkaitan dengan pendidikan agama, kesejahteraan sosial, dan pemberdayaan ekonomi pesantren. Jika kiai memilih mendukung kandidat yang memiliki visi dan kebijakan pro-pesantren, maka peluang untuk mendapatkan perhatian dari pemerintah dalam bentuk subsidi pendidikan, dana bantuan pesantren, atau regulasi yang mendukung pesantren akan lebih besar.

Pesantren di Jombang menunjukkan variasi budaya politik yang mempengaruhi pilihan politik kiai. Dalam budaya politik parokial, kiai cenderung menjaga jarak dari politik praktis, fokus pada pendidikan dan moralitas, serta menghindari keterlibatan langsung dalam politik. Sementara itu, budaya politik kaula mencerminkan kiai yang menunjukkan loyalitas terhadap otoritas yang lebih tinggi, baik dalam struktur keagamaan maupun politik. Mereka mengikuti arahan ulama senior atau pemimpin organisasi Islam. Di sisi lain, dalam budaya politik partisipan, kiai secara aktif terlibat dalam politik, memberikan dukungan kepada kandidat atau bahkan mencalonkan diri untuk jabatan politik. Implikasi dari dinamika ini adalah bahwa perbedaan budaya politik antar-pesantren dapat menciptakan variasi dalam pola dukungan politik, yang berpotensi memunculkan fragmentasi atau kompetisi antar-kelompok pesantren.

Banyak kiai yang memiliki afiliasi politik berdasarkan faktor historis, kultural, dan ideologis. Misalnya, keterikatan dengan Partai

Kebangkitan Bangsa (PKB) di Denanyar menunjukkan bagaimana faktor sejarah Nahdlatul Ulama (NU) dan jaringan kiai berperan dalam membentuk pilihan politik. Implikasi praktisnya adalah bahwa partai-partai politik yang ingin mendapatkan dukungan dari pesantren mampu memahami nilai-nilai dan sejarah pesantren agar dapat membangun hubungan yang berkelanjutan.

Berdasarkan perspektif Max Weber dan Pierre Bourdieu, keluarga memiliki peran besar dalam membentuk habitus politik kiai. Jika keluarga besar memiliki afiliasi politik tertentu, kiai cenderung mempertahankan pilihan tersebut sebagai bentuk penghormatan terhadap tradisi. Implikasi praktisnya bahwa pola pewarisan politik dalam keluarga kiai dapat menjadi faktor yang memengaruhi kesinambungan afiliasi politik antar-generasi.

Partai politik yang ingin mendapatkan dukungan dari pesantren memperhatikan beberapa aspek, seperti pendekatan berbasis nilai, yang memastikan bahwa kebijakan yang diusung sesuai dengan nilai-nilai Islam dan kepentingan pesantren. Selain itu, strategi komunikasi tradisional dan digital perlu diterapkan, dengan memanfaatkan pendekatan personal serta media digital untuk menjangkau santri dan masyarakat pesantren. Jaringan dan patronase politik juga menjadi faktor penting, dengan membangun hubungan jangka panjang dengan pesantren, bukan hanya sekadar mencari dukungan saat pemilu.

Namun, terdapat tantangan dan risiko dalam keterlibatan politik kiai. Resistensi terhadap modernisasi bisa menghambat inovasi dan modernisasi pendidikan di pesantren. Polarisasi internal juga dapat terjadi jika ada perbedaan pandangan politik, yang bisa memicu konflik dalam pesantren dan masyarakat sekitar. Selain itu, pragmatisme politik, jika lebih mementingkan keuntungan politik jangka pendek daripada nilai-nilai keislaman, bisa mengurangi legitimasi moral kiai.

Implikasi praktis dari pilihan politik kiai di pesantren Jombang menunjukkan bahwa mereka memiliki peran strategis dalam membentuk stabilitas sosial, kebijakan publik, serta dinamika politik di tingkat lokal dan

nasional. Oleh karena itu, kiai perlu menjaga keseimbangan antara nilai agama dan politik agar tetap relevan tanpa kehilangan independensi serta integritas moral mereka.

### **b. Keragaman Dan Dinamika Tindakan Kiai Dalam Pilihan Partai Politik Di Pesantren Jombang**

Implikasi praktis dari keragaman dan dinamika tindakan kiai dalam pilihan partai politik di pesantren Jombang memiliki berbagai dimensi yang dapat memberikan wawasan bagi aktor politik, akademisi, serta masyarakat luas. Berdasarkan kajian teori budaya politik Gabriel Almond serta konsep Modal dan Arena Politik dari Pierre Bourdieu, keterlibatan kiai dalam politik memiliki konsekuensi yang signifikan bagi lanskap politik lokal dan nasional.

*Pertama*, dalam perspektif budaya politik Almond, keterlibatan kiai menunjukkan perpaduan antara budaya politik subjek dan partisipan. Budaya politik subjek tercermin dalam ketaatan santri dan masyarakat pesantren terhadap keputusan politik kiai tanpa banyak pertanyaan. Di sisi lain, budaya politik partisipan terlihat dalam keterlibatan aktif kiai dalam kontestasi politik, baik sebagai pengarah opini maupun sebagai kandidat politik. Implikasi praktisnya adalah bahwa partai politik dan kandidat yang ingin memperoleh dukungan dari komunitas pesantren mempertimbangkan pendekatan yang berbasis nilai-nilai agama serta memperhatikan legitimasi kiai di mata masyarakat.

*Kedua*, dalam perspektif modal sosial dan budaya Bourdieu, kiai memiliki posisi strategis dalam arena politik karena mereka menguasai modal sosial, budaya, ekonomi, dan simbolik yang memungkinkan mereka untuk membentuk opini politik komunitasnya. Modal sosial mereka terbangun dari jaringan yang luas dengan alumni pesantren, tokoh agama, serta aktor politik lainnya. Modal budaya mereka berasal dari otoritas keagamaan yang memberi legitimasi terhadap keputusan politik yang diambil. Modal ekonomi, meskipun tidak selalu menjadi faktor utama, tetap berperan dalam mendukung keberlanjutan pesantren dan aktivitas politik yang mereka jalankan. Modal simbolik, yakni status kiai sebagai pemimpin spiritual,

menjadikan mereka sebagai figur yang berpengaruh dalam menentukan preferensi politik masyarakat.

*Ketiga*, keterlibatan kiai dalam politik berpotensi menciptakan stabilitas maupun fragmentasi di komunitas pesantren. Di satu sisi, peran mereka dalam mengarahkan pilihan politik dapat memberikan stabilitas politik berbasis nilai-nilai Islam. Namun, di sisi lain, adanya perbedaan preferensi politik antar-kiai dapat menimbulkan polarisasi di dalam komunitas pesantren itu sendiri. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme komunikasi yang lebih inklusif untuk mencegah perpecahan internal yang dapat menghambat harmoni sosial.

*Keempat*, dalam konteks demokrasi, keterlibatan kiai dalam politik dapat berkontribusi terhadap peningkatan kesadaran politik di kalangan santri dan masyarakat pesantren. Studi terbaru menunjukkan bahwa meskipun budaya politik subjek masih dominan, terdapat peningkatan dalam partisipasi politik santri yang lebih selektif dalam menentukan pilihan politik. Implikasi praktisnya adalah perlunya pendidikan politik yang lebih terbuka di pesantren untuk memastikan bahwa santri memiliki wawasan yang lebih luas dalam memahami dinamika politik, bukan sekadar mengikuti arahan tanpa refleksi kritis.

*Kelima*, hubungan historis kiai dengan organisasi keislaman seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah juga memainkan peran penting dalam menentukan pilihan politik mereka. Dalam praktiknya, kiai yang memiliki afiliasi kuat dengan organisasi tertentu cenderung mendukung partai politik yang sejalan dengan ideologi dan kepentingan organisasi tersebut. Hal ini mengindikasikan bahwa politik identitas tetap menjadi faktor dominan dalam preferensi politik kiai dan komunitas pesantren.

*Keenam*, kiai yang memiliki jaringan luas dengan aktor politik sering kali menjadi mediator dalam konflik politik lokal dan membantu membangun stabilitas sosial. Dalam berbagai kasus, mereka berperan sebagai jembatan antara masyarakat dan pemerintah, memfasilitasi dialog, dan mengurangi ketegangan politik. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan

partai politik untuk melihat kiai sebagai mitra dalam menciptakan iklim politik yang lebih stabil dan harmonis.

*Ketujuh*, dalam menghadapi tantangan politik praktis, kiai juga menyeimbangkan antara peran mereka sebagai pemimpin spiritual dan keterlibatan dalam politik. Terdapat risiko bahwa keterlibatan politik yang terlalu mendalam dapat mengancam independensi pesantren sebagai lembaga pendidikan dan moral. Oleh karena itu, kiai perlu mengembangkan strategi yang memungkinkan mereka untuk tetap berperan dalam politik tanpa mengorbankan kredibilitas dan netralitas mereka di mata masyarakat.

Implikasi praktis dari pilihan politik kiai di pesantren Jombang kompleks dan mencakup aspek sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Dengan memahami keterlibatan mereka dalam kerangka budaya politik Almond serta konsep modal dan arena politik Bourdieu, kita dapat melihat bahwa peran kiai dalam politik bukan sekadar fenomena elektoral, tetapi juga bagian dari strategi yang lebih luas untuk mempertahankan posisi dan pengaruh mereka dalam masyarakat. Oleh karena itu, bagi aktor politik dan pembuat kebijakan, pendekatan yang lebih inklusif dan berbasis nilai-nilai Islam dapat menjadi strategi efektif dalam membangun hubungan dengan komunitas pesantren secara berkelanjutan.

### **C. Keterbatasan Penelitian**

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan. Kompleksitas dan keberagaman latar belakang sosial, politik, serta budaya kiai pesantren menjadi tantangan utama dalam mendapatkan pandangan yang seragam terkait pilihan politik mereka. Selain itu, keterbatasan data empiris juga menjadi hambatan, mengingat akses terhadap beberapa kiai atau informan penting sering kali sulit diperoleh, sementara wawancara mendalam yang dilakukan berpotensi bias. Subjektivitas dalam interpretasi data, yang merupakan karakteristik penelitian kualitatif, juga dapat memengaruhi keakuratan temuan. Wilayah kajian yang terbatas pada pondok pesantren besar di Kabupaten Jombang membatasi generalisasi hasil penelitian untuk menggambarkan fenomena serupa di wilayah lain.

Faktor eksternal, seperti perubahan kondisi politik lokal maupun nasional, turut menjadi tantangan, karena hasil penelitian ini dapat kehilangan relevansi jika terjadi perubahan signifikan. Selain itu, keterbatasan waktu dan sumber daya mengurangi kemampuan penelitian untuk menangkap perubahan dinamis dalam tindakan dan pilihan politik kiai dari waktu ke waktu. Kesulitan mengakses dokumentasi historis yang relevan juga membatasi kedalaman analisis, terutama dalam memahami konteks historis tindakan politik kiai. Semua keterbatasan ini menjadi aspek penting yang diperhatikan dalam mengevaluasi validitas dan relevansi hasil penelitian.

#### **D. Rekomendasi**

Berdasarkan kesimpulan penelitian, terdapat beberapa rekomendasi penting yang dapat diusulkan untuk pengembangan lebih lanjut. *Pertama*, perlu dilakukan penguatan pendidikan politik berbasis nilai-nilai agama di kalangan pesantren untuk memastikan bahwa pilihan partai politik kiai tetap mencerminkan kepentingan komunitas dan tidak hanya bersifat pragmatis. Program pendidikan ini dapat menekankan pentingnya integrasi nilai agama, budaya lokal, dan kebutuhan modern dalam proses pengambilan keputusan politik. *Kedua*, mengingat peran budaya politik parokial, kaula, dan partisipan dalam membentuk tindakan politik kiai, penelitian lanjutan dapat mendalami interaksi antara ketiga budaya ini, terutama bagaimana kiai dapat menyeimbangkan pelestarian tradisi dengan tuntutan modernisasi politik.

Selain itu, keterlibatan keluarga dalam membentuk preferensi politik kiai menunjukkan pentingnya memperkuat dialog antar generasi di lingkungan pesantren. Dialog ini diharapkan dapat menghasilkan pemahaman yang lebih progresif terhadap peran politik kiai tanpa mengesampingkan nilai-nilai tradisional yang diwariskan. Di sisi lain, pemerintah dan partai politik perlu menjalin kolaborasi yang lebih strategis dengan kiai sebagai agen sosialisasi politik utama. Hal ini penting untuk mendorong kebijakan publik yang tidak hanya mendukung komunitas pesantren tetapi juga mencerminkan nilai-nilai religius dan keadilan sosial.

Pemanfaatan jaringan sosial dan modal budaya yang dimiliki oleh kiai juga dapat dioptimalkan untuk memperluas dampak positif mereka dalam politik lokal dan nasional. Dalam konteks ini, partai politik yang memiliki afiliasi kuat dengan nilai-nilai keagamaan, seperti PKB, dapat memperkuat hubungan dengan pesantren untuk menciptakan sinergi yang lebih besar antara agenda politik dan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, melalui penerapan rekomendasi ini, peran kiai dalam politik tidak hanya menjadi alat mobilisasi, tetapi juga sebagai katalisator transformasi sosial yang berbasis pada nilai agama, harmoni keluarga, dan kesejahteraan komunitas.